

## PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Wulandari<sup>1</sup>, Mortigor Afrizal Purba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb220810004@upbatam.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*This study looks at how Batam City's Rural Banks' (BPR) non-financial performance is affected by Good Corporate Governance (GCG). A Likert-scale questionnaire was used to gather quantitative data from 62 carefully chosen employees. Multiple linear regression was used for analysis, with validity, reliability, and classical assumption tests providing support. The findings show that transparency, accountability, and responsibility all significantly and favorably affect non-financial performance, especially when it comes to improving internal governance procedures, operational efficacy, and service quality. When combined, these GCG principles strengthen organizational discipline and promote more efficient decision-making within BPR operations. Overall, the findings indicate that strong GCG implementation not only improves institutional performance but also contributes to long-term sustainability, suggesting that BPR management should continually reinforce GCG practices to build stakeholder trust, increase operational efficiency, and enhance organizational competitiveness.*

**Keywords:** Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, BPR Performance..

### PENDAHULUAN

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bertanggung jawab untuk menyediakan layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh perbankan umum. Karena tuntutan kualitas layanan yang meningkat, efektivitas operasional, dan kepercayaan masyarakat, BPR harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi elemen strategis untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung kinerja operasional dan keberlanjutan lembaga. Tantangan tata kelola di BPR semakin relevan mengingat kondisi industri yang menghadapi peningkatan risiko, kebutuhan efisiensi, dan persaingan menjadi lebih ketat.

Walaupun prinsip-prinsip GCG telah diwajibkan oleh regulator, penerapan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kendala dalam aspek transparansi informasi, kejelasan akuntabilitas, serta pelaksanaan tanggung jawab operasional, yang berdampak pada kualitas layanan dan efektivitas proses internal. Kesenjangan implementasi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas mampu meningkatkan kinerja BPR, khususnya pada dimensi non-keuangan seperti kepuasan nasabah, efisiensi proses, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menjadi dasar perlunya evaluasi empiris terhadap pengaruh

GCG terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga keuangan, namun sebagian besar berfokus pada kinerja keuangan seperti ROA atau NPL. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh GCG terhadap kinerja non-keuangan BPR—terutama pasca-pandemi dan pada konteks BPR daerah—masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan menyoroti dimensi kinerja non-keuangan yang mencerminkan kualitas pelayanan, efektivitas internal, dan kompetensi sumber daya manusia BPR.

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan pemaparan masalah tersebut, adalah: (1) apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam; (2) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja BPR non-keuangan; (3) apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja BPR non-keuangan; dan (4) apakah ketiga prinsip tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kinerja BPR non-keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas secara parsial maupun simultan terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan kuesioner skala Likert yang disebar kepada 62 responden yang bekerja pada BPR dan terlibat dalam operasional serta

penerapan GCG. Penelitian ini membantu memperluas penelitian tentang hubungan GCG dan kinerja non-keuangan, terutama pada BPR di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi manajemen BPR dan regulator untuk memperkuat tata kelola sebagai strategi peningkatan efektivitas operasional, kualitas pelayanan, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Dasar Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Stewardship, yang menjelaskan bahwa manajemen berperan sebagai steward yang bertindak demi kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan secara kolektif. Menurut Donaldson dan Davis (1991), manajer cenderung memiliki motivasi intrinsik untuk memaksimalkan kinerja organisasi melalui perilaku yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Dalam konteks BPR, teori ini relevan karena karakteristik lembaga yang berskala relatif kecil dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menuntut manajemen untuk mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas merupakan wujud nyata perilaku steward yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional serta kualitas layanan kepada nasabah.

Selain Stewardship Theory, penelitian ini juga memakai konsep Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan teoritis utama. GCG didefinisikan sebagai set prinsip yang memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum. Dalam industri perbankan, termasuk BPR, GCG memiliki peran strategis dalam menjaga integritas proses bisnis, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kepercayaan publik. Regulasi OJK mewajibkan seluruh BPR menerapkan prinsip GCG untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai standar, mengurangi potensi risiko operasional, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Dengan demikian, hubungan antara GCG dan kinerja organisasi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan regulatif.

Dalam mengukur kinerja BPR, penelitian ini turut mengacu pada Bagan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1996), khususnya pada perspektif proses internal dan pembelajaran-pertumbuhan. Kedua perspektif ini relevan karena berfokus pada kualitas layanan, efektivitas operasional, dan

kompetensi SDM, yang merupakan komponen penting dari kinerja non-keuangan BPR. Dengan memakai perspektif ini sebagai basis teoritis, penelitian dapat menjelaskan bahwa penerapan GCG tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada perbaikan proses internal serta peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan.

### 2.2 Kinerja BPR Non - Keuangan

Kinerja BPR non-keuangan merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsi layanan publik, efektivitas proses internal, dan profesionalisme sumber daya manusia. Tidak seperti kinerja keuangan yang berfokus pada rasio profitabilitas atau kualitas aset, kinerja non-keuangan melihat seberapa efektif BPR memberikan layanan kepada nasabah, mengelola proses operasional, serta memastikan kualitas tata kelola internal berjalan sesuai ketentuan. Bagi BPR yang memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan mikro, kinerja non-keuangan menjadi ukuran strategis karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan operasional.

Aspek kualitas layanan merupakan salah satu komponen utama dalam kinerja non-keuangan. Kualitas pelayanan yang baik tercermin dari ketepatan layanan, keramahan pegawai, kecepatan proses, serta kemampuan karyawan dalam memberikan solusi kepada nasabah. BPR dituntut untuk memberikan layanan yang kompetitif agar tetap mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain, termasuk bank umum dan perusahaan fintech. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Selain itu, kinerja non-keuangan mencakup efektivitas proses internal yang meliputi ketepatan prosedur kerja, kepatuhan terhadap standar operasional, serta kelancaran alur bisnis. Efektivitas proses operasional yang baik memastikan bahwa seluruh aktivitas, mulai dari pengelolaan kredit hingga pelayanan nasabah, dapat dilakukan secara efisien dan minim risiko. BPR yang memiliki proses internal yang terstruktur dan konsisten umumnya mampu menghadapi tantangan operasional, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan keandalan pelayanan.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari kinerja non-keuangan BPR. Kompetensi pegawai, pelatihan berkelanjutan, tingkat profesionalisme, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi faktor yang menentukan kualitas operasional. Dalam sektor perbankan yang penuh

regulasi, SDM yang kompeten diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan layanan sesuai dengan ketentuan OJK serta standar tata kelola yang berlaku. Dengan demikian, kualitas SDM memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional BPR.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap tata kelola internal dan regulasi perbankan juga menjadi indikator yang menentukan kinerja non-keuangan. BPR yang patuh pada regulasi, memiliki sistem pelaporan yang jelas, serta mengikuti standar GCG akan lebih mudah menjaga integritas lembaga dan meningkatkan kepercayaan.

### 2.3 Good Corporate Governance

Mekanisme tata kelola yang dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG) memastikan bahwa proses pengelolaan perusahaan dilakukan secara terarah, transparan, dan bertanggung jawab. Karena karakteristiknya yang dekat dengan masyarakat, menghadapi risiko operasional yang tinggi, dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas layanan perbankan skala mikro, tata kelola menjadi semakin penting dalam BPR. Melalui penerapan GCG, BPR diharapkan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara aman, efektif, dan sesuai regulasi yang berlaku.

GCG berfungsi untuk memastikan setiap kebijakan dan aktivitas operasional dijalankan dengan mematuhi ketentuan hukum, standar profesional, dan etika perbankan, sehingga proses kerja berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan tata kelola yang baik juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan integritas internal, serta memperkuat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap lembaga. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi BPR, mengingat keberlanjutan operasional sangat bergantung pada loyalitas nasabah serta kedisiplinan manajemen dalam memenuhi kewajiban tata kelola.

Penelitian ini menekankan bahwa tiga prinsip GCG yang paling relevan dan berpengaruh langsung terhadap operasional BPR adalah transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi untuk menilai bagaimana tata kelola dapat memengaruhi kinerja non-keuangan, seperti kualitas layanan, efektivitas operasional, budaya organisasi, dan kepuasan internal. Dalam memahami peran strategis GCG, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana penerapan tata kelola yang baik mampu mendorong efisiensi, meningkatkan disiplin kerja, serta memperkuat struktur pengawasan internal dalam lingkungan

BPR.

#### 1. Transparansi

Informasi yang tepat, akurat, dan dapat diandalkan—tidak hanya tentang data keuangan tetapi juga tentang informasi operasional, kebijakan internal, prosedur layanan, dan hasil evaluasi serta pengawasan internal—dikenal sebagai transparansi BPR. Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan melayani segmen nasabah yang sensitif terhadap kepercayaan, transparansi menjadi elemen kunci dalam menciptakan hubungan yang sehat antara BPR dan pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi memungkinkan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, mengetahui proses layanan secara jelas, serta mengurangi potensi asimetri informasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif terhadap lembaga.

Tingkat transparansi yang baik juga berperan dalam mencegah penyimpangan operasional, karena setiap proses dapat dipantau dan dievaluasi baik oleh pihak internal maupun regulator. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas dan terdokumentasi, seperti SOP, laporan audit internal, pedoman kebijakan kredit, hingga pelaporan berkala kepada OJK, BPR mampu membangun akuntabilitas sekaligus memperkuat tata kelola internal. Selain itu, transparansi berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan melalui penyampaian informasi produk yang mudah dipahami, penjelasan biaya layanan secara rinci, serta komunikasi yang terbuka kepada nasabah dalam setiap proses transaksi. Dengan demikian, transparansi menjadi fondasi strategis bagi kelancaran operasional BPR, peningkatan kualitas layanan, serta pembentukan budaya organisasi yang profesional dan berorientasi pada integritas.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu dan unit kerja di BPR untuk mempertanggungjawabkan tugas, wewenang, serta hasil kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menuntut adanya struktur organisasi yang jelas, alur pelaporan yang terstandar, serta mekanisme pengawasan internal yang berjalan secara konsisten. Dalam konteks operasional BPR yang kompleks dan sarat regulasi, akuntabilitas menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dijalankan sesuai prosedur, tidak menyimpang dari kebijakan kredit, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

Akuntabilitas yang baik berkontribusi pada peningkatan konsistensi layanan, mengurangi kesalahan administrasi, dan memperkuat fungsi supervisi antarunit kerja. Ketika setiap pegawai memahami tugas serta tanggung jawabnya

secara jelas, proses kerja menjadi lebih terarah dan risiko operasional dapat ditekan secara signifikan. Sebaliknya, akuntabilitas yang lemah dapat menimbulkan berbagai masalah seperti rendahnya disiplin kerja, kesalahan input data, keterlambatan layanan, hingga meningkatnya potensi fraud atau penyimpangan operasional. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan melemahkan performa lembaga.

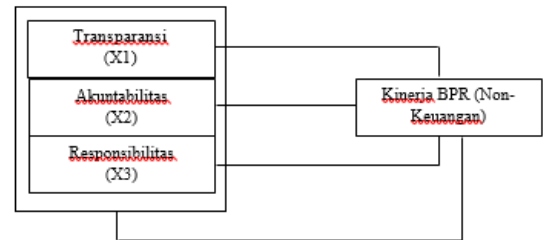
Penguatan akuntabilitas di BPR umumnya dilakukan melalui audit internal yang objektif, pelaksanaan evaluasi kinerja berbasis indikator terukur, sistem pelaporan yang transparan, dan dokumentasi prosedur kerja yang lengkap. Selain itu, pembinaan pegawai melalui pelatihan regulasi dan SOP turut memperkuat pemahaman mereka terhadap standar kerja yang harus dipenuhi. Secara langsung, akuntabilitas berdampak pada peningkatan efisiensi kerja, konsistensi operasional, kepuasan nasabah, serta kredibilitas publik terhadap keberlangsungan BPR. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penerapan Good Corporate Governance dan berperan vital dalam menciptakan tata kelola yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

### 3. Responsibilitas

Responsibilitas mencerminkan tingkat kepatuhan BPR terhadap regulasi, standar operasional, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menuntut setiap unit untuk menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum, termasuk aturan OJK, UU Perbankan, dan pedoman tata kelola internal. Dalam praktiknya, responsibilitas mencakup kepatuhan pada ketentuan kredit, pengelolaan dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, dan manajemen risiko. Tingkat responsibilitas yang tinggi menunjukkan bahwa BPR tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keamanan data, dan kesejahteraan pegawai.

Hal ini tercermin dari tindak lanjut temuan audit, kepatuhan pada SOP, serta penerapan etika perbankan. Responsibilitas yang baik meningkatkan kepercayaan nasabah, mengurangi risiko hukum, dan memperkuat reputasi, sedangkan kepatuhan rendah berpotensi menimbulkan penalti, gangguan operasional, dan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, responsibilitas menjadi indikator penting dalam menilai komitmen BPR terhadap tata kelola yang sehat.

### 2.4 Kerangka Pemikiran



### 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan BPR.

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan BPR.

H3: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan BPR.

H4: Transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan BPR.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan; responden diberi kuesioner berskala Likert untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner disusun untuk mengukur tingkat penerapan Good Corporate Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, serta kinerja BPR non-keuangan yang terlihat melalui efektivitas operasional, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah.

Seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Batam adalah subjek penelitian, sementara unit analisisnya adalah pegawai dan manajemen BPR yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan implementasi prinsip GCG. Cara pengambilan sampel memakai purposive sampling dengan kriteria responden: pegawai aktif BPR, memahami proses kerja internal, serta terlibat atau mengetahui pelaksanaan GCG di lingkungan kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden yang memenuhi syarat adalah 62 orang.

Metode pengumpulan data adalah melalui kuesioner yang dapat diakses secara online dan langsung, yang didahului oleh uji coba (pilot test) untuk memastikan kejelasan instrumen, kesesuaian butir pertanyaan, dan kemudahan pengisian bagi responden. Dalam proses ini, responden memberikan penilaian mengenai tingkat penerapan GCG dan kinerja non-keuangan berdasarkan pengalaman kerja aktual yang mereka alami. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diperiksa untuk memastikan kelengkapan, konsistensi jawaban, serta kelayakan data sebelum masuk ke tahap

pengolahan statistik.

Untuk mengevaluasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas terhadap kinerja BPR non-keuangan, analisis statistik inferensial digunakan, terutama regresi linier berganda. Analisis regresi ini diperkuat dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, dan dengan serangkaian uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi layak

digunakan.

Hasil penguraian tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis penelitian baik secara parsial maupun simultan, serta memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja non-keuangan BPR di Kota Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diproses dengan mengirimkan kuesioner kepada 62 peserta dan kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 30..

### HASIL UJI VALIDITAS

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
X1.1	0,812	0.2500	
X1.2	0,767	0.2500	
X1.3	0,716	0.2500	<i>Valid</i>
X1.4	0,832	0.2500	
X1.5	0,738	0.2500	
X2.1	0,787	0.2500	<i>Valid</i>
X2.2	0,829	0.2500	
X2.3	0,758	0.2500	
X2.4	0,861	0.2500	
X2.5	0,817	0.2500	
X3.1	0,732	0.2500	<i>Valid</i>
X3.2	0,800	0.2500	
X3.3	0,806	0.2500	
X3.4	0,809	0.2500	
X3.5	0,853	0.2500	
Y.1	0,732	0.2500	<i>Valid</i>
Y.2	0,800	0.2500	
Y.3	0,806	0.2500	
Y.4	0,809	0.2500	
Y.5	0,853	0.2500	

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Sebagai referensi, Tabel 1 menunjukkan bahwa semua item yang berkaitan dengan variabel Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan

Kinerja BPR akurat atau valid. Ini dikarenakan nilai r- hitung masing-masing item lebih besar daripada nilai r-tabel sebesar 0,2500.

**HASIL UJI RELIABILITAS**

**Tabel 2** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Transparansi	0,832	> 0,70	Reliabel
Akuntabilitas	0,868	> 0,70	Reliabel
Responsibilitas	0,859	> 0,70	Reliabel
Kinerja BPR	0,823	> 0,70	Reliabel

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, seluruh variabel—meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kinerja BPR—memperoleh nilai Cronbach's Alpha yang melampaui batas minimum 0,70. Temuan ini

mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik, sehingga setiap butir pernyataan dinilai konsisten dalam merepresentasikan konstruk yang diukur.

**HASIL UJI NORMALITAS**

**Tabel s3** Hasil Uji Normalitas

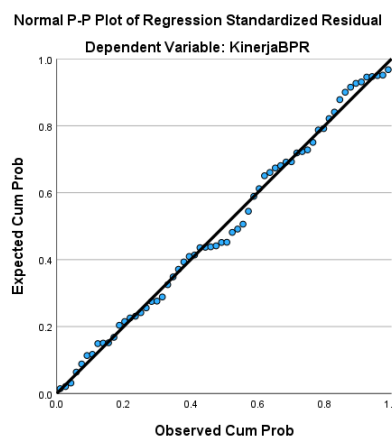
<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		62
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.81472405
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.065
	<i>Positive</i>	0.065
	<i>Negative</i>	-.051
<i>Test Statistic</i>		0.065
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)<sup>c</sup></i>		0.200 <sup>d</sup>

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Merujuk Tabel 3, hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov memperlihatkan nilai Asymp. Sig sebesar 0,200, yang berada di atas ambang

0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data tidak menyimpang dari distribusi normal, sehingga residual pada model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 1** Hasil Grafik Normal P-P Plot of Regression



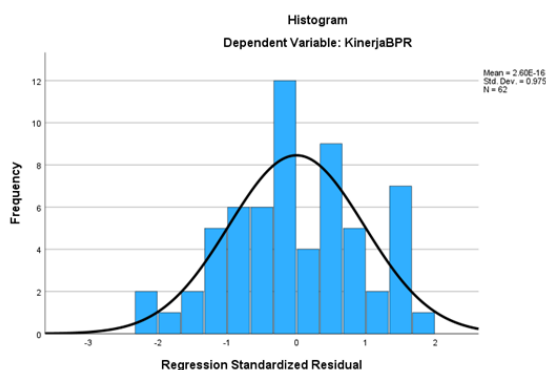
Gambar 1 menunjukkan hasil uji normalitas memakai grafik Normal P–P Plot of Regression

Standardized Residual. Titik-titik pada grafik terlihat mengikuti garis diagonal secara konsisten, yang

mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Pola tersebut mendukung hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel sebelumnya,

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram**



Dari Gambar kedua menunjukkan hasil uji normalitas dengan histogram residual. Dalam bentuk histogram yang menyerupai kurva lonceng, sebagian besar residual tersebar secara merata ke kedua sisi kurva dan berkumpul di sekitar nilai rata-

rata. Sebagai hasil dari pola, distribusi residual cenderung normal. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi, karena mereka konsisten dengan hasil pada plot grafik P-P dan uji Kolmogorov-Smirnov.

## HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Collinearity Tolerance	Statistics VIF	Keterangan
Transparansi (X1)	0.990	1.011	Bebas Multikolinearitas
Akuntabilitas (X2)	0.984	1.017	Bebas Multikolinearitas
Responsibility (X3)	0.981	1.019	Bebas Multikolinearitas

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Menurut Tabel 4, ketiga variabel independen, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, menunjukkan nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yang menunjukkan bahwa tidak

ada gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, model regresi dapat dianggap valid dan stabil untuk digunakan dalam analisis.

## HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
Transparansi (X1)	0.714	Bebas Heteroskedastisitas
Akuntabilitas (X2)	0.782	Bebas Heteroskedastisitas
Responsibility (X3)	0.723	Bebas Heteroskedastisitas

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Hasil uji Glejser, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5, menunjukkan bahwa seluruh variable Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Ini

menandakan tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah dipenuhi, dan model regresi dianggap layak untuk menguji hipotesis.

**HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant )	2.186	1.662
Transparansi	0.287	0.075
Akuntabilitas	0.311	0.064
Responsibilitas	0.261	0.068

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Tabel 6 menunjukkan bahwa peneliti merumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,186 + 0,287X_1 + 0,311X_2 + 0,261X_3$$

Adapun penafsirannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta 2,186 berarti bahwa tanpa pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas, kinerja dasar BPR berada pada angka tersebut.
2. Koefisien Transparansi (0,287) menunjukkan bahwa peningkatan 1 satuan transparansi meningkatkan kinerja BPR sebesar 0,287 satuan, menandakan pentingnya keterbukaan informasi dan

kejelasan laporan.

3. Koefisien Akuntabilitas (0,311) artinya Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan internal meningkatkan efektivitas operasional dengan meningkatkan kinerja BPR sebesar 0,311 satuan per satuan akuntabilitas.
4. Koefisien Responsibilitas (0,261) menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur standar sebesar satu satuan, kinerja BPR akan meningkat sebesar 0,261 satuan.

**HASIL UJI T (PARSIAL)**

**Tabel 7.** Hasil Uji Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
			Beta			
1 (Constant)	2.186	1.662			1.315	0.194
Transparansi	0.287	0.075	0.358		3.839	<,001
Akuntabilitas	0.311	0.064	0.451		4.818	<,001
Responsibilitas	0.261	0.068	0.361		3.852	<,001

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Untuk masing-masing variabel independen, hasil uji t (parsial) ditunjukkan dalam Tabel 8:

1. Transparansi (X1)  
Nilai t-tabel 1,672 kurang dari nilai t-hitung 3,839, dan memiliki nilai signifikansi 0,001, ditunjukkan oleh hasil uji t. Karena fakta bahwa transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja BPR, hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Akuntabilitas (X2)  
Nilai t-hitung untuk variabel akuntabilitas sebesar 4,818 melampaui nilai t-tabel 1,672 dan memiliki nilai signifikansi 0,001. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima karena fakta bahwa akuntabilitas

berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja BPR.

3. Responsibilitas (X3)  
Nilai t-hitung 3,852 untuk tanggung jawab lebih besar daripada nilai t-tabel 1,672 dan memiliki nilai signifikansi 0,001. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja BPR, dan hipotesis ketiga (H3) diterima.  
Secara keseluruhan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja BPR secara parsial.

## HASIL UJI F (SIMULTAN)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	200.613	3	66.871	19.307	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	200.887	58	3.464		
	Total	401.500	61			

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Merujuk Tabel 8 menunjukkan nilai F hitung 19,307 lebih tinggi dari F tabel 2,76, dan signifikansi 0,000 lebih tinggi dari 0,05. H0 dibuang, dan H1 diterima. Singkatnya, hipotesis keempat (H4)

diterima karena transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab berakibat besar kepada kinerja BPR secara bersama.

## HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.707 <sup>a</sup>	0.500	0.474	1.86106

a. Predictors: (Constant), Responsibility, Transparansi, Akuntabilitas  
 b. Dependent Variable: KinerjaBPR

(Sumber : Data Penelitian, 2030)

Merujuk Tabel 9, nilai Adjusted R Square sebesar 0,474 menampilkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas secara simultan menjelaskan 47,4% jenis Kinerja BPR. Sisanya, 52,6%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model,

seperti kualitas SDM, budaya kerja, sistem teknologi informasi, dan kondisi eksternal. Dengan demikian, model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik

## SIMPULAN

Bersumber pada hasil penelitian, sebagai hasilnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam.
2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam.
3. Responsibility secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam.
4. Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibility secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPR non-keuangan di Kota Batam

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Good corporate governance dan kinerja lembaga keuangan mikro. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 45–56.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship

- theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Harahap, S. S. (2021). Akuntansi perbankan: Prinsip, regulasi, dan implementasi. RajaGrafindo Persada.
- Haryanto, S., & Suryanto, T. (2020). Good corporate governance and bank performance. *International Journal of Financial Research*, 11(2), 121–130.
- Hernita, N., & Qustolani, D. (2022). Pengaruh good corporate governance dan kompetensi SDM terhadap kinerja perusahaan BPR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 12(3), 255–265.
- Ismail, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas layanan lembaga keuangan mikro. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 8(2), 77–88.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs

- and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKG.
- Nirmala, N. P. A., Yuliani, N. W., & Sudiana, I. K. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja lembaga perkreditan desa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 11(2), 122–135.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat*.
- Putra, A., & Mas'ud, A. (2023). Penerapan good corporate governance pada perusahaan keluarga di bidang perbankan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(1), 49–60.
- Rahman, A., & Wibowo, H. (2021). Good corporate governance dan kinerja operasional BPR. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 215–227.
- Sam'ani. (2008). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(2), 255–268.
- Setyawan, A., & Pratama, A. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas operasional bank perkreditan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 89–98.
- Sukardika, I., Arthana, I. K. R., & Yuliani, N. P. A. (2020). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja BPR di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 102–115.
- Suryanto, R., & Sulastri, Y. (2019). Pengaruh tanggung jawab sosial dan kepatuhan regulasi terhadap kinerja lembaga keuangan mikro. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 33–42.
- Wulandari, D., & Kusuma, H. (2023). Peran balanced scorecard dalam mengukur kinerja non-keuangan bank daerah. *Jurnal Manajemen Strategis*, 8(1), 33–